

KODE AKUN	URAIAN
5 . 2 . 4 . 07 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 4 . 07 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 4 . 08 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 4 . 08 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 4 . 08 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5 . 2 . 4 . 08 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 4 . 08 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
5 . 2 . 4 . 10 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut
5 . 2 . 4 . 10 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5 . 2 . 4 . 11 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah
5 . 2 . 4 . 11 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5 . 2 . 4 . 11 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam
5 . 2 . 4 . 11 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal
5 . 2 . 4 . 11 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 4 . 12 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 4 . 12 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5 . 2 . 4 . 12 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
5 . 2 . 4 . 13 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5 . 2 . 4 . 13 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5 . 2 . 4 . 14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5 . 2 . 4 . 14 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5 . 2 . 4 . 15 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5 . 2 . 4 . 15 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5 . 2 . 4 . 15 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5 . 2 . 4 . 15 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5 . 2 . 4 . 15 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5 . 2 . 4 . 15 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5 . 2 . 4 . 15 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5 . 2 . 4 . 15 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bumi (PLTP)
5 . 2 . 4 . 15 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5 . 2 . 4 . 15 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5 . 2 . 4 . 15 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5 . 2 . 4 . 16 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5 . 2 . 4 . 16 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5 . 2 . 4 . 16 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5 . 2 . 4 . 17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan
5 . 2 . 4 . 17 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5 . 2 . 4 . 18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas
5 . 2 . 4 . 18 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5 . 2 . 4 . 18 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5 . 2 . 4 . 19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman
5 . 2 . 4 . 19 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum

KODE AKUN	URAIAN
5 . 2 . 4 . 20 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa
5 . 2 . 4 . 20 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5 . 2 . 4 . 20 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5 . 2 . 4 . 20 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
5 . 2 . 4 . 21 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
5 . 2 . 4 . 22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon
5 . 2 . 4 . 22 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5 . 2 . 4 . 22 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5 . 2 . 4 . 22 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas
5 . 2 . 4 . 23 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5 . 2 . 4 . 23 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5 . 2 . 4 . 23 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5 . 2 . 4 . 23 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5 . 2 . 5 . 01 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat
5 . 2 . 5 . 01 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
5 . 2 . 5 . 01 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5 . 2 . 5 . 01 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
5 . 2 . 5 . 01 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
5 . 2 . 5 . 01 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5 . 2 . 5 . 01 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5 . 2 . 5 . 01 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan
5 . 2 . 5 . 02 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala
5 . 2 . 5 . 02 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5 . 2 . 5 . 03 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
5 . 2 . 5 . 03 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
5 . 2 . 5 . 03 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
5 . 2 . 5 . 03 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
5 . 2 . 5 . 03 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5 . 2 . 5 . 03 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)
5 . 2 . 5 . 03 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara
5 . 2 . 5 . 03 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)
5 . 2 . 5 . 03 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5 . 2 . 5 . 03 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5 . 2 . 5 . 04 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan
5 . 2 . 5 . 04 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
5 . 2 . 5 . 04 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
5 . 2 . 5 . 04 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
5 . 2 . 5 . 04 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan
5 . 2 . 5 . 04 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen
5 . 2 . 5 . 04 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah
5 . 2 . 5 . 04 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5 . 2 . 5 . 05 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
5 . 2 . 5 . 05 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air

KODE AKUN	URAIAN
5.2.5.05.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5.2.5.05.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5.2.5.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan
5.2.5.06.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak .
5.2.5.06.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas
5.2.5.06.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata
5.2.5.06.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan
5.2.5.06.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5.2.5.06.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
5.2.5.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan
5.2.5.07.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura
5.2.5.07.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
5.2.5.07.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
5.2.5.07.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5.2.6	Belanja Modal Aset Tetap BLUD/FKTP/BOSNAS
5.2.6.01	Belanja Modal Aset Tetap BLUD/FKTP/BOSNAS
5.2.6.01.01	Belanja Modal Aset Tetap BLUD/FKTP/BOSNAS
5.2.6.01.01	Belanja Modal Aset Tetap BLUD/FKTP/BOSNAS
5.3	BELANJA TAK TERDUGA
5.3.1	Belanja Tak Terduga
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga
5.3.1.01.01	Belanja Tak Terduga
5.3.1.01.02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam
5.3.1.01.03	Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya
6	TRANSFER
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.1.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6.1.1.01.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.1.2.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
6.1.2.01.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
6.1.2.01.02	Dst.....
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
6.2.1.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
6.2.1.01.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
6.2.1.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6.2.1.02.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.2.01.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.2.01.02	Dst.....
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik
6.2.3.01.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP
6.2.3.01.02	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PAN
6.2.3.01.03	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PKB
6.2.3.01.04	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR
6.2.3.01.05	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA
6.2.3.01.06	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT
6.2.3.01.07	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PKS
6.2.3.01.08	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PPP
6.2.4	Transfer Dana Otonomi Khusus
6.2.4.01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota
6.2.4.01.01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota

KODE AKUN	URAIAN
6.2.4.01.02	Dst.....
7	PEMBIAYAAN
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7.1.1	Penggunaan SiLPA
7.1.1.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7.1.1.01.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7.1.1.02	Koreksi SiLPA
7.1.1.02.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7.1.1.02.02	Lain-lain
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan
7.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan
7.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.1.3.01.01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN
7.1.3.01.02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD
7.1.3.01.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri
7.1.4.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7.1.4.01.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7.1.4.02	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7.1.4.02.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7.1.4.03	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7.1.4.03.01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7.1.4.04	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7.1.4.04.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7.1.4.05	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7.1.4.05.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7.1.4.06	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7.1.4.06.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang
7.1.5.01	Penerimaan Kembali Plutang kepada Perusahaan Negara
7.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7.1.5.02	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7.1.5.02.01	Penerimaan Kembali Plutang kepada Perusahaan Daerah
7.1.5.03	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7.1.5.03.01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7.1.5.04	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.1.5.04.01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.1.5.05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7.1.5.05.01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7.1.6.01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7.1.6.01.01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7.1.6.02	Penarikan Dana Bergulir
7.1.6.02.01	Penarikan Dana Bergulir
7.1.6.03	Pencairan Deposito Jangka Panjang
7.1.6.03.01	Pencairan Deposito Jangka Panjang
7.1.6.04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7.1.6.04.01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7.1.7	Pinjaman Luar Negeri
7.1.7.01	Pinjaman Luar Negeri
7.1.7.01.01	Pinjaman Luar Negeri
7.1.8	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.1.8.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.1.8.01.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
7.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan

KODE AKUN	URAIAN
7.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7.2.2.01	Penyertaan Modal pada BUMN
7.2.2.01.01	Penyertaan Modal pada BUMN
7.2.2.02	Penyertaan Modal pada BUMD
7.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD
7.2.2.03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7.2.2.03.01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7.2.3.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7.2.3.02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7.2.3.02.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7.2.3.03	Pelunasan Obligasi Daerah
7.2.3.03.01	Pelunasan Obligasi Daerah
7.2.3.04	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7.2.3.05	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7.2.3.05.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7.2.3.06	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7.2.3.06.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah
7.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7.2.4.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7.2.4.02.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7.2.4.04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.2.4.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7.2.5.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7.2.5.01.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7.2.5.02	Pembentukan Dana Bergulir
7.2.5.02.01	Pembentukan Dana Bergulir
7.2.5.03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7.2.5.03.01	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7.2.5.04	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7.2.5.04.01	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.6.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.6.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.7.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.7.01.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7.3	SALDO ANGGARAN LEBIH
7.3.1	Surplus/Defisit LRA
7.3.1.01	Surplus/Defisit LRA
7.3.1.01.01	Surplus/Defisit LRA
7.3.2	Pembiayaan Netto
7.3.2.01	Pembiayaan Netto
7.3.2.01.01	Pembiayaan Netto
7.3.3	SILPA/SIKPA
7.3.3.01	SILPA/SIKPA
7.3.3.01.01	SILPA/SIKPA
7.3.4	Perubahan SAL
7.3.4.01	Perubahan SAL
7.3.4.01.01	Perubahan SAL
8	PENDAPATAN - LO

KODE AKUN	URATAN
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO
8.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8.1.1.01.01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8.1.1.01.02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8.1.1.01.03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8.1.1.01.04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8.1.1.01.05	PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8.1.1.01.06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8.1.1.01.07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8.1.1.01.08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8.1.1.01.09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8.1.1.01.10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8.1.1.01.11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8.1.1.02.01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO
8.1.1.02.02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO
8.1.1.02.03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
8.1.1.02.04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO
8.1.1.02.05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO
8.1.1.02.06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8.1.1.02.07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8.1.1.02.08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8.1.1.02.09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8.1.1.02.10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8.1.1.02.11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8.1.1.03.01	Pajak Bahan Bakar Premium - LO
8.1.1.03.02	Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO
8.1.1.03.03	Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO
8.1.1.03.04	Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8.1.1.03.05	Pajak Bahan Bakar Gas - LO
8.1.1.03.06	Dst
8.1.1.04	Pajak Air Permukaan - LO
8.1.1.04.01	Pajak Air Permukaan - LO
8.1.1.05	Pajak Rokok - LO
8.1.1.05.01	Pajak Rokok - LO
8.1.1.06	Pajak Hotel - LO
8.1.1.06.01	Hotel - LO
8.1.1.06.02	Motel - LO
8.1.1.06.03	Losmen - LO
8.1.1.06.04	Gubuk Pariwisata - LO
8.1.1.06.05	Wisma Pariwisata - LO
8.1.1.06.06	Pesanggrahan - LO
8.1.1.06.07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO
8.1.1.06.08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO
8.1.1.07	Pajak Restoran - LO
8.1.1.07.01	Restoran - LO
8.1.1.07.02	Rumah Makan - LO
8.1.1.07.03	Kafetaria - LO
8.1.1.07.04	Kantin - LO
8.1.1.07.05	Warung - LO
8.1.1.07.06	Bar - LO
8.1.1.07.07	Jasa Boga/ Katering - LO
8.1.1.08	Pajak Hiburan - LO
8.1.1.08.01	Tontonan Film/Bioskop - LO
8.1.1.08.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8.1.1.08.03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LO
8.1.1.08.04	Pameran - LO

KODE AKUN	URATAN
8.1.1.08.05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LO
8.1.1.08.06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8.1.1.08.07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO
8.1.1.08.08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO
8.1.1.08.09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO
8.1.1.08.10	Pertandingan Olahraga - LO
8.1.1.08.11	Kolam Renang/Pemandian - LO
8.1.1.08.12	Insidentil - LO
8.1.1.08.13	Persewaan VCD/DVD dan sejenisnya - LO
8.1.1.09	Pajak Reklame - LO
8.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO
8.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain - LO
8.1.1.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO
8.1.1.09.04	Pajak Reklame Selebaran - LO
8.1.1.09.05	Pajak Reklame Berjalan - LO
8.1.1.09.06	Pajak Reklame Udara - LO
8.1.1.09.07	Pajak Reklame Apung - LO
8.1.1.09.08	Pajak Reklame Suara - LO
8.1.1.09.09	Pajak Reklame Film/Slide - LO
8.1.1.09.10	Pajak Reklame Peragaan - LO
8.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LO
8.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO
8.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO
8.1.1.11	Pajak Parkir - LO
8.1.1.11.01	Pajak Parkir - LO
8.1.1.12	Pajak Air Tanah - LO
8.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LO
8.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8.1.1.14.01	Asbes - LO
8.1.1.14.02	Batu Tulis - LO
8.1.1.14.03	Batu setengah permata - LO
8.1.1.14.04	Batu Kapur - LO
8.1.1.14.05	Batu Apung - LO
8.1.1.14.06	Batu Permata - LO
8.1.1.14.07	Bentonit - LO
8.1.1.14.08	Dolomit - LO
8.1.1.14.09	Feldspar - LO
8.1.1.14.10	Garam Batu (Halite) - LO
8.1.1.14.11	Grafit - LO
8.1.1.14.12	Granit/Andesit - LO
8.1.1.14.13	Gips - LO
8.1.1.14.14	Kalsit - LO
8.1.1.14.15	Kaolin - LO
8.1.1.14.16	Leusit - LO
8.1.1.14.17	Magnesit - LO
8.1.1.14.18	Mika - LO
8.1.1.14.19	Marmor - LO
8.1.1.14.20	Nibrat - LO
8.1.1.14.21	Opsidien - LO
8.1.1.14.22	Oker - LO
8.1.1.14.23	Pasir dan kerikil - LO
8.1.1.14.24	Pasir Kuarsa - LO
8.1.1.14.25	Perlit - LO
8.1.1.14.26	Phospat - LO
8.1.1.14.27	Talk - LO
8.1.1.14.28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8.1.1.14.29	Tanah Diatome - LO

KODE AKUN	URAIAN
8.1.1.14.30	Tanah Liat - LO
8.1.1.14.31	Tawas (Alum) - LO
8.1.1.14.32	Tras - LO
8.1.1.14.33	Yarosif - LO
8.1.1.14.34	Zeolit - LO
8.1.1.14.35	Basal - LO
8.1.1.14.36	Trakit - LO
8.1.1.14.37	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO
8.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8.1.1.16.01	BPHTB - Pemindahan Hak - LO
8.1.1.16.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
8.1.1.17	Pajak Lingkungan - LO
8.1.1.17.01	Pajak Lingkungan - LO
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8.1.2.01.02	Puskesmas keliling - LO
8.1.2.01.03	Puskesmas pembantu - LO
8.1.2.01.04	Balai Pengobatan - LO
8.1.2.01.05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8.1.2.01.06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LO
8.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO
8.1.2.02.02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LO
8.1.2.02.03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO
8.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8.1.2.03.01	Kartu Tanda Penduduk - LO
8.1.2.03.02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO
8.1.2.03.03	Kartu Identitas Kerja - LO
8.1.2.03.04	Kartu Penduduk Sementara - LO
8.1.2.03.05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8.1.2.03.06	Kartu Keluarga - LO
8.1.2.03.07	Akta Catatan Sipil - LO
8.1.2.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8.1.2.04.01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8.1.2.04.02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO
8.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8.1.2.06.01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO
8.1.2.06.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO
8.1.2.06.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO
8.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8.1.2.07.01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8.1.2.07.02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8.1.2.07.03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8.1.2.07.04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8.1.2.07.05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8.1.2.07.06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8.1.2.07.07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8.1.2.07.08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8.1.2.07.09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8.1.2.07.10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8.1.2.07.11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8.1.2.07.12	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor- LO
8.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO

KODE AKUN	URAIAN
8 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8 . 1 . 2 . 08 . 02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8 . 1 . 2 . 08 . 03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 02	Penyediaan Peta Foto - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 03	Penyediaan Peta Digital - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 04	Penyediaan Peta Tematik - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8 . 1 . 2 . 10 . 01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8 . 1 . 2 . 11 . 01	Rumah Tangga - LO
8 . 1 . 2 . 11 . 02	Perkantoran - LO
8 . 1 . 2 . 11 . 03	Industri - LO
8 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8 . 1 . 2 . 12 . 01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO
8 . 1 . 2 . 12 . 02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LO
8 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8 . 1 . 2 . 13 . 01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8 . 1 . 2 . 13 . 02	Pelatihan Teknis - LO
8 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8 . 1 . 2 . 14 . 01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO
8 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8 . 1 . 2 . 15 . 02	Laboratorium - LO
8 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LO
8 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8 . 1 . 2 . 16 . 01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO
8 . 1 . 2 . 16 . 02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8 . 1 . 2 . 16 . 03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO
8 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8 . 1 . 2 . 17 . 01	Pelelangan Ikan - LO
8 . 1 . 2 . 17 . 02	pelelangan Temak - LO
8 . 1 . 2 . 17 . 03	Pelelangan Hasil Bumi - LO
8 . 1 . 2 . 17 . 04	Pelelangan Hasil Hutan - LO
8 . 1 . 2 . 17 . 05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LO
8 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LO
8 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO
8 . 1 . 2 . 18 . 02	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO
8 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO
8 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO
8 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8 . 1 . 2 . 21 . 01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO
8 . 1 . 2 . 21 . 02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO
8 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8 . 1 . 2 . 22 . 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LO
8 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LO
8 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

KODE AKUN	URAIAN
8 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO
8 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO
8 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8 . 1 . 2 . 27 . 01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LO
8 . 1 . 2 . 28 . 01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8 . 1 . 2 . 28 . 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LO
8 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8 . 1 . 2 . 29 . 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LO
8 . 1 . 2 . 30 . 01	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8 . 1 . 2 . 30 . 02	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LO
8 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8 . 1 . 2 . 31 . 01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO
8 . 1 . 2 . 31 . 02	Penggunaan Koridor Tertentu - LO
8 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO
8 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO
8 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO
8 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO
8 . 1 . 3 . 01 . 03	Dst
8 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO
8 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO
8 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst
8 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LO
8 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst
8 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LO
8 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LO
8 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO
8 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO
8 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 04	Penerimaan dari Kelebihan Pembayaran Biaya Perijinan - LO
8 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO

KODE AKUN	URATAN
8 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 13	Dst...
8 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO
8 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

KODE AKUN	URAIAN
8.1.4.09.26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8.1.4.09.27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8.1.4.09.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8.1.4.09.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8.1.4.09.30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8.1.4.09.31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8.1.4.09.32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8.1.4.10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8.1.4.10.01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8.1.4.10.02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8.1.4.10.03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8.1.4.10.04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
8.1.4.11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8.1.4.11.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8.1.4.11.02	Dst
8.1.4.12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8.1.4.12.01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
8.1.4.12.02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8.1.4.12.03	Hasil Eksekusi Jaminan Atas KTP Musiman - LO
8.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian -LO
8.1.4.13.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8.1.4.13.02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8.1.4.13.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8.1.4.13.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8.1.4.13.05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO
8.1.4.13.06	Pendapatan dari Pengembalian Raskin - LO
8.1.4.13.07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS
8.1.4.13.08	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Jalan/Jaringan
8.1.4.13.09	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium
8.1.4.13.10	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Transport
8.1.4.13.11	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Listrik, Telepon/Internet dan Air
8.1.4.13.12	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Kesehatan
8.1.4.13.13	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Lemur
8.1.4.13.14	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembelian Barang/Peralatan
8.1.4.13.15	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembelian Makan Minum
8.1.4.13.16	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembelian Obat-obatan
8.1.4.13.17	Pendapatan Dari Pengembalian Dana Hibah - LO
8.1.4.14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8.1.4.14.01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8.1.4.14.02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8.1.4.14.03	Dst
8.1.4.15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8.1.4.15.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8.1.4.15.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8.1.4.16.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8.1.4.16.02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
8.1.4.16.03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8.1.4.16.04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8.1.4.16.05	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa/Angsuran Kios Pasar - LO
8.1.4.16.06	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa/Angsuran Los Pasar - LO
8.1.4.17	Pendapatan Zakat - LO
8.1.4.17.01	Pendapatan Zakat - LO
8.1.4.17.02	Dst
8.1.4.18	Pendapatan BLUD - LO
8.1.4.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8.1.4.18.02	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8.1.4.18.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8.1.4.18.04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO

KODE AKUN	URAIAN
8.1.4.19	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8.1.4.19.01	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8.1.4.20.01	Fasilitas Sosial - LO
8.1.4.20.02	Fasilitas Umum - LO
8.1.4.20.03	Dst
8.1.4.21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8.1.4.21.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8.1.4.21.02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8.1.4.21.03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8.1.4.21.04	Dst
8.1.4.22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir
8.1.4.22.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO
8.1.4.22.02	Dst
8.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8.1.4.23.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
8.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LO
8.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO
8.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO
8.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO
8.2.1.01.04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
8.2.1.01.05	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO
8.2.1.01.06	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8.2.1.01.07	Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota - LO
8.2.1.01.08	Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota - LO
8.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 - LO
8.2.1.01.10	Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota - LO
8.2.1.01.11	Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut (Minyak Bumi dan Gas Bumi) - LO
8.2.1.01.12	Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut (Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya) - LO
8.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksloitasi (Royalti) - LO
8.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum
8.2.1.02.12	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO
8.2.1.02.13	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara - LO
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8.2.1.03.01	Dana Alokasi Umum - LO
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8.2.1.04.01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8.2.1.04.02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
8.2.1.04.03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
8.2.1.04.04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO
8.2.1.04.05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8.2.1.04.06	DAK Bidang Kehutanan - LO
8.2.1.04.07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8.2.1.04.08	DAK Bidang Kesehatan - LO
8.2.1.04.09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8.2.1.04.10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8.2.1.04.11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO

KODE AKUN	URAIAN
8 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 20	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 21	DAK Air Minum - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 22	DAK Sanitasi - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 23	DAK Infrastruktur Irigasi - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 24	DAK Infrastruktur Jalan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 25	DAK Transportasi Perdesaan - LO
8 . 2 . 1 . 05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
8 . 2 . 1 . 05 . 01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LO
8 . 2 . 1 . 05 . 02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) - LO
8 . 2 . 1 . 05 . 03	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8 . 2 . 1 . 05 . 04	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8 . 2 . 1 . 05 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan - LO
8 . 2 . 1 . 05 . 06	Jaminan Persalinan - LO
8 . 2 . 1 . 05 . 07	Bantuan Operasional KB - LO
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
8 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO
8 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO
8 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LO
8 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LO
8 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LO
8 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 06	Dst
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst
8 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst
8 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO
8 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO
8 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst
8 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst
8 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO
8 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO
8 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO
8 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8 . 3 . 1 . 01 . 02	Dst

KODE AKUN	URATAN
8.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8.3.1.02.02	Pendapatan Dana BOS
8.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8.3.1.03.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8.3.1.03.02	Dst
8.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO
8.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
8.3.1.04.02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
8.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LO
8.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LO
8.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LO
8.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LO
8.3.2	Dana Darurat - LO
8.3.2.01	Dana Darurat - LO
8.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8.3.2.01.02	Dst
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO
8.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LO
8.3.3.01.01	Pendapatan Lainnya - LO
8.3.3.01.02	Dst
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8.4.1.01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8.4.1.01.01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8.4.1.01.02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8.4.1.01.03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8.4.1.01.04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8.4.1.01.05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8.4.1.01.06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8.4.1.01.07	Dst
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8.4.2.01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8.4.2.01.01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8.4.2.01.02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8.4.2.01.03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
8.4.2.01.04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
8.4.2.01.05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
8.4.2.01.06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8.4.2.01.07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
8.4.2.01.08	Dst
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01.02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO
8.5.1.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8.5.1.01.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
9	BEBAN
9.1	BEBAN OPERASI
9.1.1	Beban Pegawai - LO
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga - LO
9.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan - LO
9.1.1.01.04	Beban Tunjangan Fungsional - LO
9.1.1.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO
9.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras - LO

KODE AKUN	URATAN
9.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji - LO
9.1.1.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9.1.1.01.10	Beban Uang Paket - LO
9.1.1.01.11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9.1.1.01.12	Beban Tunjangan Komisi - LO
9.1.1.01.13	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO
9.1.1.01.14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO
9.1.1.01.15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9.1.1.01.16	Beban Tunjangan Perumahan - LO
9.1.1.01.17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9.1.1.01.18	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO
9.1.1.01.19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
9.1.1.01.20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
9.1.1.01.21	Beban Tunjangan Profesi Guru
9.1.1.01.22	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja
9.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9.1.1.02.01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO
9.1.1.02.02	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO
9.1.1.02.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO
9.1.1.02.04	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO
9.1.1.02.05	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO
9.1.1.02.06	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
9.1.1.03	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
9.1.1.03.01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9.1.1.03.02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9.1.1.04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9.1.1.04.01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO
9.1.1.04.02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9.1.1.04.03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9.1.1.04.04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO
9.1.1.04.05	Beban Pemungutan PBB - LO
9.1.1.05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9.1.1.05.01	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9.1.1.05.02	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9.1.1.05.03	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
9.1.1.05.04	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9.1.1.05.05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9.1.1.05.06	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9.1.1.05.07	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9.1.1.05.08	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9.1.1.05.09	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9.1.1.05.10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9.1.1.05.11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9.1.1.05.12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9.1.1.05.13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO
9.1.1.05.14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
9.1.1.05.15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
9.1.1.05.16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
9.1.1.05.17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO
9.1.1.06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9.1.1.06.01	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO
9.1.1.06.02	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
9.1.1.06.03	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9.1.1.06.04	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
9.1.1.06.05	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9.1.1.06.06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9.1.1.06.07	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

KODE AKUN	URAIAN
9.1.1.06.08	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9.1.1.06.09	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
9.1.1.06.10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9.1.1.06.11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9.1.1.06.12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9.1.1.06.13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9.1.1.06.14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9.1.1.06.15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
9.1.1.06.16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
9.1.1.06.17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9.1.1.06.18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9.1.1.06.19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9.1.1.06.20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9.1.1.06.21	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
9.1.1.06.22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO
9.1.1.06.23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
9.1.1.06.24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO
9.1.1.06.25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
9.1.1.06.26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO
9.1.1.06.27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
9.1.1.06.28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO
9.1.1.06.29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9.1.1.06.30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
9.1.1.06.31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO
9.1.1.06.32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
9.1.1.07	Beban Uang Lembar - LO
9.1.1.07.01	Beban Uang Lembar PNS - LO
9.1.1.07.02	Beban Uang Lembar Non PNS - LO
9.1.1.08	Beban Pegawai BLUD
9.1.1.08.01	Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit
9.1.2	Beban Barang dan Jasa
9.1.2.01	Beban Bahan Pakai Habis
9.1.2.01.01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor
9.1.2.01.02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
9.1.2.01.03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
9.1.2.01.04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
9.1.2.01.05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
9.1.2.01.06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9.1.2.01.07	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9.1.2.01.08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
9.1.2.01.09	Beban Bahan untuk Cendramata/Souvenir
9.1.2.01.10	Beban Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho
9.1.2.01.11	Beban Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai
9.1.2.01.12	Beban Persediaan buku & plat uji kir
9.1.2.02	Beban Persediaan Bahan/ Material
9.1.2.02.01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan
9.1.2.02.02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
9.1.2.02.03	Beban Persediaan Bibit Temak
9.1.2.02.04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan
9.1.2.02.05	Beban Persediaan Bahan Kimia
9.1.2.02.06	Beban Persediaan Makanan Pokok
9.1.2.02.07	Beban Bahan Harian (Sembako)
9.1.2.02.08	Beban Bahan untuk Pakan Ternak
9.1.2.02.09	Beban Bahan Obat-Obatan/Alat Kesehatan
9.1.2.02.10	Beban Bahan/Suku Cadang Non Kendaraan Bermotor
9.1.2.02.11	Beban Bahan Perlengkapan untuk Pendidikan
9.1.2.02.12	Beban Bahan Obat-Obatan/Alat Kesehatan (Dana Non DAU)
9.1.2.02.13	Beban Bahan Perlengkapan untuk Kesehatan
9.1.2.02.14	Beban Bahan Perlengkapan untuk Posko Isidentil

KODE AKUN	URAIAN
9.1.2.02.15	Beban Bangunan/Gedung untuk Pihak Ke-III
9.1.2.02.16	Beban Bahan/Barang Jadi untuk Pihak Ke-III
9.1.2.02.17	Beban Kendaraan/Alat Mobilitas untuk Pihak Ke-III
9.1.2.02.18	Beban Bahan/Barang Jadi untuk Pihak Ke-III (Dana non DAU)
9.1.2.02.19	Beban Bahan/Barang Penunjang Kegiatan
9.1.2.03	Beban Jasa Kantor
9.1.2.03.01	Beban Jasa telepon
9.1.2.03.02	Beban Jasa air
9.1.2.03.03	Beban Jasa listrik
9.1.2.03.04	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
9.1.2.03.05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah
9.1.2.03.06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet
9.1.2.03.07	Beban Jasa Paket/Pengiriman
9.1.2.03.08	Beban Jasa Sertifikasi
9.1.2.03.09	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9.1.2.03.10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9.1.2.03.11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9.1.2.03.12	Pengadaan Software Paket/Aplikasi Terapan Non-Penyusunan
9.1.2.03.13	Beban Jasa Penyiaran/Peliputan
9.1.2.03.14	Beban Jasa Perawatan Gedung Kantor
9.1.2.03.15	Beban Jasa Perawatan Halaman Kantor
9.1.2.03.16	Beban Jasa Perawatan AC
9.1.2.03.17	Beban Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu
9.1.2.03.18	Beban Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik (Meubelair dll)
9.1.2.03.19	Beban Jasa Perawatan Barang Elektronik (Sound System, Televisi dll)
9.1.2.03.20	Beban Jasa Perawatan Barang Non Elektronik (Mesin Ketik dll)
9.1.2.03.21	Beban Operasional Pelayanan Masyarakat
9.1.2.03.22	Beban Ekstrapoding/Kesehatan
9.1.2.03.23	Beban Operasional Pendidikan
9.1.2.03.24	Beban Operasional Kesehatan
9.1.2.03.25	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan
9.1.2.03.26	Beban Jasa/ Tenaga Kerja
9.1.2.03.27	Beban Pemeriksaan/pengujian Laboratorium
9.1.2.03.28	Beban Koneksi Jaringan Khusus
9.1.2.03.29	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9.1.2.03.30	Beban Jasa Pengganti Uang Saku
9.1.2.03.31	Beban Jasa Pengganti Uang Pembinaan
9.1.2.03.32	Beban Jasa Pendaftaran Perkara
9.1.2.04	Beban Premi Asuransi
9.1.2.04.01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9.1.2.04.02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9.1.2.04.03	Beban Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan
9.1.2.04.04	Beban Premi Asuransi Hari Tua
9.1.2.05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.01	Beban Jasa Service
9.1.2.05.02	Beban Penggantian Suku Cadang
9.1.2.05.03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9.1.2.05.04	Beban Jasa KIR
9.1.2.05.05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
9.1.2.05.08	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
9.1.2.06	Beban Cetak dan Penggandaan
9.1.2.06.01	Beban Cetak
9.1.2.06.02	Beban Penggandaan
9.1.2.06.03	Beban Penjilidan
9.1.2.06.04	Beban Cetak Foto/Dokumentasi
9.1.2.07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.1.2.07.01	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

KODE AKUN	URAIAN
9.1.2.07.02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
9.1.2.07.03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
9.1.2.07.04	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
9.1.2.07.05	Beban Sewa Kamar Hotel/Penginapan
9.1.2.07.06	Beban Sewa Tempat/Lahan Pertanian
9.1.2.08	Beban Sewa Sarana Mobilitas
9.1.2.08.01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.1.2.08.02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9.1.2.08.03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9.1.2.08.04	Dst ...
9.1.2.09	Beban Sewa Alat Berat
9.1.2.09.01	Beban Sewa Eskavator
9.1.2.09.02	Beban Sewa Bulldoser
9.1.2.09.03	Beban Sewa Traktor
9.1.2.10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.1.2.10.01	Beban Sewa Meja Kursi
9.1.2.10.02	Beban Sewa Komputer dan Printer
9.1.2.10.03	Beban Sewa Proyektor
9.1.2.10.04	Beban Sewa Generator
9.1.2.10.05	Beban Sewa Tenda
9.1.2.10.06	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
9.1.2.10.07	Beban Sewa Sound System
9.1.2.10.08	Beban Sewa Navigasi
9.1.2.10.09	Beban Sewa Alat Kesehatan/Laboratorium/Kedokteran
9.1.2.10.10	Beban Sewa Alat Musik
9.1.2.10.11	Beban Sewa Alat Potong Rumput
9.1.2.10.12	Beban Sewa Alat Pembersih Lantai
9.1.2.10.13	Beban Sewa Alat Dekorasi
9.1.2.11	Beban Makanan dan Minuman
9.1.2.11.01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
9.1.2.11.02	Beban Makanan dan Minuman Rapat
9.1.2.11.03	Beban Makanan dan Minuman Tamu
9.1.2.11.04	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan
9.1.2.11.05	Beban Makanan dan Minuman Rumah Tangga Kepala Daerah
9.1.2.11.06	Beban Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap
9.1.2.11.07	Beban Makanan dan Minuman Peserta
9.1.2.11.08	Beban Makanan dan Minuman Pasien
9.1.2.12	Beban Pakalan Dinas dan Atributnya
9.1.2.12.01	Beban pakalan Dinas KDH dan WKDH
9.1.2.12.02	Beban Pakalan Sipil Harian (PSH)
9.1.2.12.03	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
9.1.2.12.04	Beban Pakalan Dinas Harian (PDH)
9.1.2.12.05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9.1.2.12.06	Beban Lencana/Name Tag
9.1.2.12.07	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
9.1.2.13	Beban Pakaian Kerja
9.1.2.13.01	Beban Pakalan kerja lapangan
9.1.2.13.02	Beban Sepatu/Topi Lapangan/Atribut
9.1.2.14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9.1.2.14.01	Beban Pakaian KORPRI
9.1.2.14.02	Beban Pakaian Adat Daerah
9.1.2.14.03	Beban Pakaian Batik Tradisional
9.1.2.14.04	Beban Pakalan Olahraga
9.1.2.14.05	Beban Pakaian Seragam Paskibraka
9.1.2.14.06	Beban Pakaian Seragam Korsik
9.1.2.14.07	Beban Pakaian Khusus Pelayanan
9.1.2.14.08	Belanja Pakalan Seragam SD
9.1.2.14.09	Belanja Pakalan Seragam SMP
9.1.2.14.10	Belanja Pakalan Seragam SMA/SMK

KODE AKUN	URAIAN
9.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas
9.1.2.15.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.1.2.15.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
9.1.2.15.03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
9.1.2.15.04	Beban Akomodasi dan Transportasi
9.1.2.16	Beban Perjalanan Pindah Tugas
9.1.2.16.01	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
9.1.2.16.02	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
9.1.2.17	Beban Pemulangan Pegawai
9.1.2.17.01	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiu Dalam Daerah
9.1.2.17.02	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiu Luar Daerah
9.1.2.17.03	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
9.1.2.18	Beban Pemeliharaan
9.1.2.18.01	Beban Pemeliharaan Tanah
9.1.2.18.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9.1.2.18.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9.1.2.18.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9.1.2.18.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9.1.2.18.06	Beban Pemeliharaan (DAK)
9.1.2.19	Beban Jasa Konsultasi
9.1.2.19.01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9.1.2.19.02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9.1.2.19.03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9.1.2.19.04	Beban Jasa Konsultansi Teknik
9.1.2.19.06	Beban Jasa Konsultansi Penilai
9.1.2.19.07	Beban Jasa Konsultansi Aktuaris
9.1.2.19.08	Beban Jasa Konsultansi Akuntansi
9.1.2.19.09	Beban Jasa Konsultansi Manajemen
9.1.2.19.10	Beban Jasa atas Promosi Kegiatan
9.1.2.19.11	Beban Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi
9.1.2.20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.1.2.20.01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9.1.2.20.02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9.1.2.20.03	Dst.....
9.1.2.21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.1.2.21.01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9.1.2.21.02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9.1.2.21.03	Dst ...
9.1.2.22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9.1.2.22.01	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3
9.1.2.22.02	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
9.1.2.22.03	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
9.1.2.22.04	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
9.1.2.22.05	Dst
9.1.2.23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
9.1.2.23.01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
9.1.2.23.02	Beban Sosialisasi
9.1.2.23.03	Beban Bimbingan Teknis
9.1.2.23.04	Dst
9.1.2.24	Beban Honorarium Non Pegawai
9.1.2.24.01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9.1.2.24.02	Beban Moderator
9.1.2.24.03	Beban Honorarium Tukang/Tenaga Kebersihan
9.1.2.25	Beban Honorarium PNS - LO
9.1.2.25.01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO
9.1.2.25.02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO
9.1.2.25.03	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
9.1.2.25.04	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO
9.1.2.25.05	Beban Honorarium Jasa Pelayanan Medis

KODE AKUN	URATAN
9.1.2.25.06	Beban Honorarium PNS Pengelola Keuangan
9.1.2.26	Beban Honorarium Non PNS - LO
9.1.2.26.01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
9.1.2.26.02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO
9.1.2.27	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9.1.2.27.01	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9.1.2.27.02	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9.1.2.28	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
9.1.2.28.01	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
9.1.2.29	Beban Barang Dana BOS
9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS
9.1.2.30	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9.1.2.30.01	Beban Bahan Pakai Habis yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9.1.2.30.02	Beban Bahan/Material yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9.1.2.30.03	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9.1.2.30.04	Beban Makan/Minum yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9.1.2.30.05	Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9.1.2.31	Beban Barang dan Jasa BLUD
9.1.2.31.01	Beban Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
9.1.2.31.02	Beban Barang dan Jasa BLUD FKTP
9.1.3	Beban Bunga
9.1.3.01	Beban Bunga Utang Pinjaman
9.1.3.01.01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9.1.3.01.02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9.1.3.01.03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9.1.3.01.04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9.1.3.01.05	Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9.1.3.01.06	Dst
9.1.3.02	Beban Bunga Utang Obligasi
9.1.3.02.01	Beban Bunga Utang Obligasi
9.1.3.02.02	Dst
9.1.4	Beban Subsidi
9.1.4.01	Beban Subsidi
9.1.4.01.01	Beban Subsidi kepada BUMN
9.1.4.01.02	Beban Subsidi kepada BUMD
9.1.4.01.03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9.1.4.01.04	Dst
9.1.5	Beban Hibah
9.1.5.01	Beban Hibah kepada Pemerintah
9.1.5.01.01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9.1.5.02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9.1.5.02.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9.1.5.02.02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9.1.5.02.03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9.1.5.02.04	Beban Hibah kepada Pemerintah Desa
9.1.5.03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9.1.5.03.01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9.1.5.03.02	Dst
9.1.5.04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9.1.5.04.01	Beban Hibah kepada Kelompok/Organisasi/Anggota Masyarakat
9.1.5.05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9.1.5.05.01	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
9.1.5.05.02	Dst ...
9.1.5.06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
9.1.5.06.01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....
9.1.5.06.02	Beban Hibah Dana BOS ke SMP/MTs Swasta
9.1.5.06.03	Beban Hibah Dana BOS ke SMA/SMK/MA Swasta
9.1.5.06.04	Beban Hibah Dana BOS ke Pendidikan Usia Dini TK/RA, PLAYGROUP/SPS

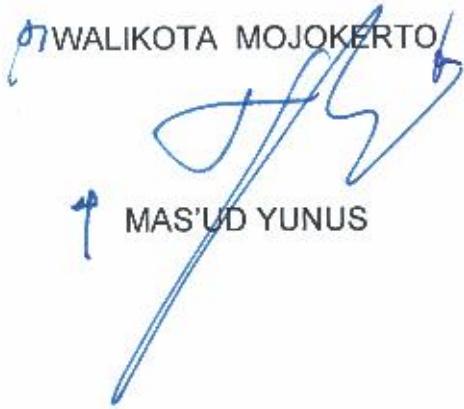
KODE AKUN	URATAN
9.1.5.06.05	Beban Hibah Dana Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) - ULA/WUSTHO
9.1.6	Beban Bantuan Sosial
9.1.6.01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9.1.6.01.01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...
9.1.6.01.02	Dst
9.1.6.02	Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
9.1.6.02.01	Beban Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat
9.1.6.02.02	Beban Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan
9.1.6.02.03	Beban Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim non Panti
9.1.6.02.04	Beban Bantuan Sosial Kepada Lansia Kurang Mampu
9.1.6.03	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
9.1.6.04	Beban Bantuan Sosial Kepada Partai Politik
9.1.6.04.01	Beban Bantuan Sosial Kepada Partai Politik
9.1.6.05	Beban Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan
9.1.6.05.01	Beban Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.7.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9.1.7.01.01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9.1.7.01.02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9.1.7.01.03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9.1.7.01.05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
9.1.7.01.06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9.1.7.01.07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9.1.7.01.08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9.1.7.01.09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9.1.7.01.10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9.1.7.01.11	Beban Penyusutan Alat Ukur
9.1.7.01.12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan
9.1.7.01.13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
9.1.7.01.14	Beban Penyusutan Alat Kantor
9.1.7.01.15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9.1.7.01.16	Beban Penyusutan Komputer
9.1.7.01.17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9.1.7.01.18	Beban Penyusutan Alat Studio
9.1.7.01.19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9.1.7.01.20	Beban Penyusutan Peralatan Pernancar
9.1.7.01.21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9.1.7.01.22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9.1.7.01.23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9.1.7.01.24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9.1.7.01.25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9.1.7.01.26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9.1.7.01.27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9.1.7.01.28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9.1.7.01.29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9.1.7.01.30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9.1.7.01.31	Beban Penyusutan Senjata Api
9.1.7.01.32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
9.1.7.01.33	Beban Penyusutan Amunisi
9.1.7.01.34	Beban Penyusutan Senjata Sinar
9.1.7.01.35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9.1.7.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9.1.7.02.02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9.1.7.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9.1.7.02.04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9.1.7.02.05	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan
9.1.7.02.06	Beban Penyusutan Bangunan Candi

KODE AKUN	URAIAN
9.1.7.02.07	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
9.1.7.02.08	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9.1.7.02.09	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9.1.7.02.10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9.1.7.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
9.1.7.03.01	Beban Penyusutan Jalan
9.1.7.03.02	Beban Penyusutan Jembatan
9.1.7.03.03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9.1.7.03.04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9.1.7.03.05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9.1.7.03.06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
9.1.7.03.07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9.1.7.03.08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9.1.7.03.09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9.1.7.03.10	Beban Penyusutan Bangunan Air
9.1.7.03.11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9.1.7.03.12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9.1.7.03.13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9.1.7.03.14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9.1.7.03.15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9.1.7.03.16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9.1.7.03.17	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan
9.1.7.03.18	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9.1.7.03.19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9.1.7.03.20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9.1.7.03.21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9.1.7.03.22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9.1.7.03.23	Beban Penyusutan Jaringan Gas
9.1.7.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
9.1.7.04.01	Beban Penyusutan Barang-barang Perpustakaan
9.1.7.04.02	Beban Penyusutan Barang Beroak Kebudayaan
9.1.7.04.03	Beban Penyusutan Alat Olahraga Lainnya
9.1.7.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya
9.1.7.05.01	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat
9.1.7.05.02	Beban Penyusutan Barang Sedang Dalam Penelusuran Perolehannya
9.1.7.05.03	Beban Penyusutan Aset Pinjam Pakai
9.1.7.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9.1.7.06.01	Beban Amortisasi Goodwill
9.1.7.06.02	Beban Amortisasi Lisenzi dan Frenchise
9.1.7.06.03	Beban Amortisasi Hak Cipta
9.1.7.06.04	Beban Amortisasi Paten
9.1.7.06.05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang
9.1.8.01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9.1.8.01.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9.1.8.01.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9.1.8.01.03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.1.8.01.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9.1.8.01.05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9.1.8.01.06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9.1.8.01.07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya
9.1.8.01.08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9.1.8.01.09	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9.1.8.01.10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9.1.8.01.11	Dst.....
9.1.8.02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9.1.8.02.01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9.1.8.02.02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
9.1.8.02.03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

KODE AKUN	URAIAN
9.1.8.02.04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
9.1.8.02.05	Beban Penyisihan Uang Muka
9.1.8.02.06	Beban Penyisihan Tunggakan Pihak Ketiga
9.1.8.02.07	Beban Penyisihan Dianber
9.1.9	Beban Lain-lain
9.1.9.01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9.1.9.01.01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9.1.9.02	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1.9.02.01	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1.9.03	Beban Lain-lain
9.1.9.03.01	Beban Lain-lain
9.1.9.03.02	Beban Atas Barang Extra Kompatabel
9.2	BEBAN TRANSFER
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.1.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9.2.1.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9.2.1.01.02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi
9.2.1.01.03	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.2.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9.2.2.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9.2.2.01.02	Dst.....
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9.2.3.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9.2.3.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9.2.3.01.02	Dst.....
9.2.3.02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9.2.3.02.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9.2.3.02.02	Dst.....
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9.2.5.01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9.2.5.01.01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9.2.6.01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9.2.6.01.01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9.3.1.01.02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9.3.1.01.03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9.3.1.01.04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9.3.1.01.05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9.3.1.01.06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9.3.1.01.07	Dst
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9.3.2.01.02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9.3.2.01.03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9.3.2.01.04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9.3.2.01.05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9.3.2.01.06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9.3.2.01.07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9.3.2.01.08	Dst
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

KODE AKUN	URAIAN
9.3.3.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.01	Defisit Penghapusan Aset Lainnya
9.3.3.01.02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9.3.3.01.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.04	Dst .
9.4	BEBAN LUAR BIASA
9.4.1	Beban Luar Biasa
9.4.1.01	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.01	Beban Tak Terduga
9.4.1.01.02	Beban Bencana Alam
9.4.1.01.03	Beban Luar Biasa Lainnya

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS